**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Semakin meningkatnya perkembangan ekonomi di Indonesia, kebutuhan akan pelayanan publik kepada masyarakat juga akan semakin bertambah, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas kinerja pemerintahan yang baik (*Good Governance)*. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan pelayanan publik nilai-nilai yang mencirikan *good governance*  dapat dilakukan secara lebih mudah dan nyata oleh birokrasi pemerintah.

*Good governance* telah menjadi hal yang penting bagi setiap entitas saat ini, tidak hanya sektor swasta, sektor publik dan pemerintahan pun memperhitungkan hal ini. Masyarakat Indonesia mulai memperhatikan masalah tata kelola pemerintahan sebab terkait dengan bagaimana pemerintahan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Sorotan utama masyarakat pada sektor publik atau pemerintahan adalah mengenai tata kelola keuangan negara. Pemerintah dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai *stakeholder* dari negara.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan. Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara juga harus mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Pertanggungjawaban haruslah diungkapkan secara transparan sehingga benar-benar mencerminkan akuntabilitas. Untuk menilai akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah, maka laporan keuangan pemerintah juga harus diaudit. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) sebagai auditor eksternal.

( Desi Handayani, 2012)

Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi yang terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Disamping tenaga-tenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah.

( Harry Wibawa, 2015)

Selain itu, degradasi integritas dan akuntabilitas juga sangat diperlukan dalam menilai atau menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sikap konsistensi, kejujuran, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang paling penting dalam pengukuran kualitas laporan keuangan daerah, hal ini dapat dibuktikan banyaknya penyimpangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun kualitas SDM sangat berkompeten, sehingga pengelolaan keuangan daerah harus didasari dengan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Tenaga akuntansi yang terampil tidak dapat menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik apabila tidak menjungjung tinggi nilai integritas dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclousure)* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know)*, hak untuk memberi informasi (*right to be informed),* dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to)*. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclousure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) dalam *Concepts Statement* No.1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan.

( Mardiasmo, 2004; 31)

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mendorong pemerintah daerah meningkatkan akuntabillitas laporan keuangan kepada publik. Daerah yang laporan keuangannya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) alias bisa dipertanggungjawabkan masih rendah. Harry menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan atas 504 laporan keuangan pemerintah daerah atau sudah 93,51 persen diproses pada semester I tahun 2015. Pada 2015, sebanyak 539 pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan. “Beberapa pemerintah daerah yang nilainya c, hampir sekitar 5 persen dari sekitar 539 pemerintah daerah. Kira-kira masih ada 25 pemerintah daerah yang mendapatkan *disclaimer* (tidak menyatakan pendapat),” kata Harry di Bogor, Jawa Barat, selasa (13/10). Harry menyatakan, belum seluruh laporan keuangan daerah mendapatkan WTP. Pada 2013, Harry melanjutkan, jumlah laporan keuangan yang mendapatkan WTP hanya 29,96 persen. Jumlah itu meningkat pada tahun 2014 menjadi 49,80 persen dari 524 pemerintah daerah yang menyusun laporan. “Masalah yang sering ditemukan di daerah biasanya terkait aset, perjalanan dinas, dan bantuan sosial. Tiga masalah tersebut terkait keuangan di daerah,”ujar Harry. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

([www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id))

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif kepemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini kepemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas (Nurlan Darise, 2008 ; 2). Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintahan daerah adalah melalui laporan keuangannya. Pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Mardiasmo, 2004;35).

Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan. Indra Bastian (2007;4) mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan yang dihasilkan.

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2014 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Harry, selama semester II Tahun 2014 BPK menemukan diantaranya 3.293 masalah yang berdampak finansial senilai Rp 14,74 trilliun yang terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 1,42 trilliun, potensi kerugian negara senilai Rp 3,77 trilliun dan kekurangan penerimaan senilai Rp 9,55 trilliun. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II 2014, BPK mengungkapkan 7.950 temuan yang terdiri dari atas 7.789 masalah terhadap ketidakpatuhan perundang-undangan dan masalah kelemahan SPI. Selain itu masalah lain yang menonjol diantaranya kurangnya persiapan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan penerimaan pajak dari penerimaan migas, serta ketidakpatuhan KKKS atas ketentuan *Cost Recorvery*. Pemerintah Pusat dan Daerah belum siap mendukung penerapan SAP berbasis akrual pada 2015 dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

([www.m.okezone.com](http://www.m.okezone.com))

Pada aplikasinya di dalam pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/ bupati / walikota, mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintahan yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Jika sistem akuntansi di Indonesia di tingkat pusat diatur oleh peraturan Menteri Keuangan yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat, maka sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah dan juga didukung oleh Peraturan Menteri dalam negeri No.59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah.

(Angga Dwi Permadi, 2013)

Pengelola administrasi pemerintahan perlu memahami akuntansi. Mereka juga harus memahami pelaporan akuntansi dan juga memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian. Akuntansi memiliki implikasi terhadap hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan organisasi, serta sistem akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi strategi. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara pemerintah daerah dengan *stakeholder* diperlukan suatu media untuk mengkomunikasikan program pemerintah. Salah satu media yang dipandang paling relevan dalam mengkomunikasikan dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi daerah.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan telah merampungkan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam tahun anggaran 2014. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman, Rabu 7 Juli 2015, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, banyak ditemukan terkait laporan keuangan daerah yang belum mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setidaknya, hanya 30 persen pemda tingkat I dan II yang baru mencapai WTP. Padahal, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di 2014, menargetkan sebanyak 60 persen harus berstatus WTP.”Untuk 2014, dari 539 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat WTP sekitar 30 persen. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak optimal,”ujar Yudi di gedung BPK, Jakarta. Menurutnya, dengan adanya hal tersebut, sudah seharusnya pemda lebih meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hali ini dilakukan sebagai rencana tahun depan tentang standar akuntansi pemerintah sudah berbasis akrual.

([www.m.viva.co.id](http://www.m.viva.co.id))

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kritik pemerintah daerah yang lamban beri laporan keuangan. Hasil audit BPK menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat lebih baik dibandingkan daerah. Ketua BPK Harry Aziz menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan tidak peduli dengan aturan ini. Salah satunya karena masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang terlambat diberikan. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan LKPD tepat waktu,”tegas Harry. Langkah itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperoleh opini WTP demi terciptanya *good governance* dalam pengelolaan keuangan.

([www.m.merdeka.com](http://www.m.merdeka.com))

Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari laporan keuangan pemerintah daerah selama lima tahun, dari 2010-2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini *unqualified* atau *qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1

**TABEL 1.1**

**Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

**Tahun 2010 - 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Opini | Σ |
| WTP | % | WDP | % | TW | % | TMP | % |
| 2010 | 34 | 6 | 343 | 66 | 26 | 5 | 119 | 23 | 522 |
| 2011 | 67 | 13 | 349 | 67 | 8 | 1 | 100 | 19 | 524 |
| 2012 | 120 | 23 | 319 | 61 | 6 | 1 | 79 | 15 | 524 |
| 2013 | 153 | 34 | 276 | 60 | 9 | 2 | 18 | 4 | 456 |
| 2014 | 252 | 47 | 247 | 46 | 5 | 1 | 35 | 6 | 539 |

 (sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian pada umumnya memiliki pengendalian intern yang memadai. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini Tidak Wajar dan Tidak Memperoleh Opini memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan laporam keuangan. Masih banyaknya opini Tidak Wajar dan Tidak Memperoleh Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan efektivitas sistem pelaporan informasi pemerintah daerah belum optimal. Meskipun mengalami kenaikan persentase dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak serta merta dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Pemberian opini tersebut hanya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan yang ditegaskan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui langkah-langkah nyata, terprogram, dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja. Yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, beberapa penelitian terdahulu sehubungan dengan pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013) yang berjudul “ Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen. Penulis menggunakan variabel akuntabilitas publik, sedangkan peneliti tidak menggunakan variabel tersebut.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Harry Wibawa (2015) yang berjudul “ Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu variabelnya yaitu akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada salah satu variabel independen. Salah satu variabel tersebut yaitu apabila peneliti meneliti mengenai sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), sedangkan penulis meneliti mengenai sistem akuntansi keuangan daerah.

Penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah juga telah dilakukan oleh Adrianus Fajar (2010) yang berjudul “ Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah “. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan dan pengaruh positif antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan sebesar 78,3%. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada variabel independen. Penulis meneliti tentang akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan peneliti meneliti sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, kemudian perbedaan yang lainnya adalah penulis meneliti di DPKAD dan Inspektorat Kota Bandung, sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan teori dan uraian di atas, serta didukung beberapa fakta yang ada, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Pengaruh Akuntabillitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

.

* 1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Berikut akan lebih dijelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
	1. **Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini, yaitu kegunaan praktis dan kegunanaan teoritis. Berikut akan lebih dijelaskan kedua kegunaan tersebut :

* + 1. **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan sistem akuntansi, akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan daerah pada sektor publik dan pemerintah.
4. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara teknis di lapangan dan dapat memberikan kemampuan dalam memecahkan masalah secara nyata.
5. Bagi pemerintah
6. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keadaan yang sedang terjadi di Indonesia mengenai akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah.
7. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sumber informasi yang penting untuk meningkatkan kinerja Pemerintah daerah.
8. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada mengenai akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.
9. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah.

1. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai pengaruh akuntabiltas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

* + 1. **Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu bidang studi yang membahas mengenai akuntansi keuangan khususnya mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

* 1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Inspektorat Kota Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan yaitu pada tanggal disyahkannya penelitian.